

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KEMAMPUAN
AUDITOR INVESTIGATIF TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM
PEMBUKTIAN KECURANGAN**

(Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)

Diajukan Oleh

Putri Andira Nurdin
4515013038



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)

Nama Mahasiswa : Putri Andira Nurdin

Stambuk/NIM : 4515013038

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi



H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andira Nurdin
NIM : 4515013038
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan daftar pustaka.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 7 Juni 2019

Mahasiswa yang bersangkutan



Putri Andira Nurdin

**THE EFFECT OF INVESTIGATIVE AUDITOR'S INDEPENDENCE AND
ABILITY ON THE AUDIT PROCEDURES IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS
TOWARDS FRAUD PROOFING
(Empirical Study at BPKP Representatives of South Sulawesi Province)**

By:

PUTRI ANDIRA NURDIN

Accounting Study Program Faculty of Economics

Bosowa University

ABSTRACT

PUTRI.ANDIRA.NURDIN.2019. Scription.The Effect of Investigative Auditor's Independence and Ability on the Audit Procedures Implementation Effectiveness Towards Fraud Proofing (Empirical Study at BPKP Representatives of South Sulawesi Province) guided by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA and Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

The purpose of this study is to determine whether the investigative auditor's independence and ability have an influence towards the audit procedures effectiveness in fraud proofing. The object of this research is the BPKP Representative of South Sulawesi Province. The analytical tool used is multiple linear regression analysis.

The results showed that the investigative auditor's independence and ability had a positive impact towards the audit procedures effectiveness in fraud proofing, which means that the increased independence and ability of investigative auditors would further enhance the effectiveness of audit procedures in fraud proofing.

Keywords : *independence, investigative auditor's ability, audit procedures*

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KEMAMPUAN AUDITOR INVESTIGATIF
TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM
PEMBUKTIAN KECURANGAN
(Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)**

Oleh:

PUTRI ANDIRA NURDIN

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

PUTRI.ANDIRA.NURDIN.2019.Skripsi.Pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA dan Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah independensi dan kemampuan auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Objek penelitian ini adalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan, yang berarti bahwa semakin meningkat independensi dan kemampuan auditor investigatif maka akan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Kata Kunci : independensi, kemampuan auditor investigatif, prosedur audit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN KEMAMPUAN AUDITOR INVESTIGATIF TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM PEMBUKTIAN KECURANGAN (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa doa, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan mengoreksi selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah memberikan pelayanan dalam membantu seluruh kegiatan administrasi penulis.
6. Pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan serta staf dan auditor yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh informasi yang diperlukan selama penelitian.
7. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua beserta om dan tante yang senantiasa memberikan dukungan berupa moril maupun material yang tiada henti-hentinya.
8. Ulfiah Aulia Utami sahabat yang selalu memberikan motivasi sekaligus seperjuangan menyusun skripsi.
9. Zulfajri Abadi yang setia mendengarkan keluh kesah yang tiada hentinya dan memberikan semangat dalam mengisi hari-hari yang dilewati selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat sedari SMA Annisa Rizki Pratiwi, Daniyah Fadhillah, Eka Bonita, Erlangga, Fathur Rizky, Nia Aprilia, Rio Reynaldy, Riyadh Prawiryo, dan Vanny Ayustia yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya.
11. Teman-teman dari awal masuk kuliah sampai sekarang Cecilia Agustin Johan, Dahniar, Jumriani, dan Siti Nurhalima Fitri Agustini yang telah memberikan doa, dukungan serta bantuan selama ini.

12. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2015 Universitas Bosowa yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya dalam memberikan bantuan dan doa kepada penulis. Semoga segala bantuan yang telah diberikan ini mendapat imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 7 Juni 2019

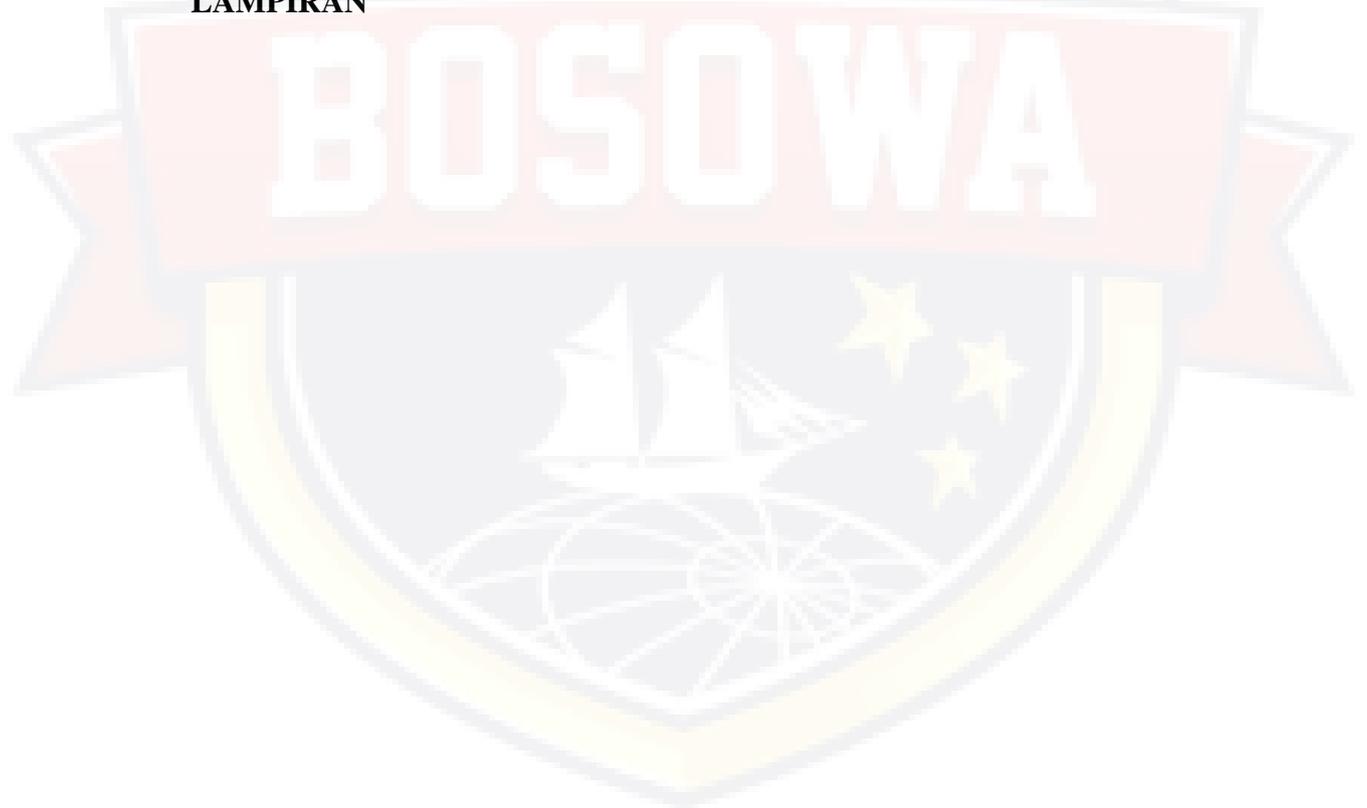
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEORISINILAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 <i>Auditing</i>	9
2.1.1.1 Pengertian <i>Auditing</i>	9
2.1.1.2 Standar <i>Auditing</i>	10
2.1.1.3 Jenis-Jenis <i>Auditing</i>	12
2.1.1.4 Klasifikasi Auditor	13
2.1.2 Audit Investigasi	15
2.1.2.1 Pengertian Audit Investigasi	15
2.1.2.2 Standar Audit Investigasi	15
2.1.2.3 Jenis-Jenis Audit Investigasi	17
2.1.2.4 Aksioma Audit Investigasi	18
2.1.2.5 Sasaran dan Target Audit Invetigasi	19
2.1.2.6 Prinsip Audit Investigasi	20
2.1.2.7 Prosedur Audit Investigasi	21
2.1.2.8 Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit Investigasi	24

2.1.3 Independensi Auditor	25
2.1.4 Kemampuan Auditor	27
2.1.5 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit	29
2.1.6 Kecurangan	32
2.1.6.1 Pengertian Kecurangan	32
2.1.6.2 Jenis-Jenis Kecurangan	33
2.1.6.3 Penyebab Kecurangan	34
2.1.6.4 Pencegahan Kecurangan	35
2.1.6.5 Pembuktian Kecurangan	36
2.2 Kerangka Pikir	37
2.3 Hipotesis	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.2 Populasi dan Sampel	39
3.2.1 Populasi	39
3.2.2 Sampel	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.3.1 Jenis Data	40
3.3.2 Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Analisis	41
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	42
3.5.2 Uji Kualitas Data	42
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	43
3.5.4 Uji Hipotesis	44
3.6 Definisi Operasional	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	47
4.1.1 Sejarah Singkat BPKP	47
4.1.2 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	51
4.1.3 Struktur Organisasi	52

4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab	52
4.1.5 Karakteristik Responden	56
4.2 Analisis Data	61
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	63
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	65
4.2.4 Uji Hipotesis	68
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

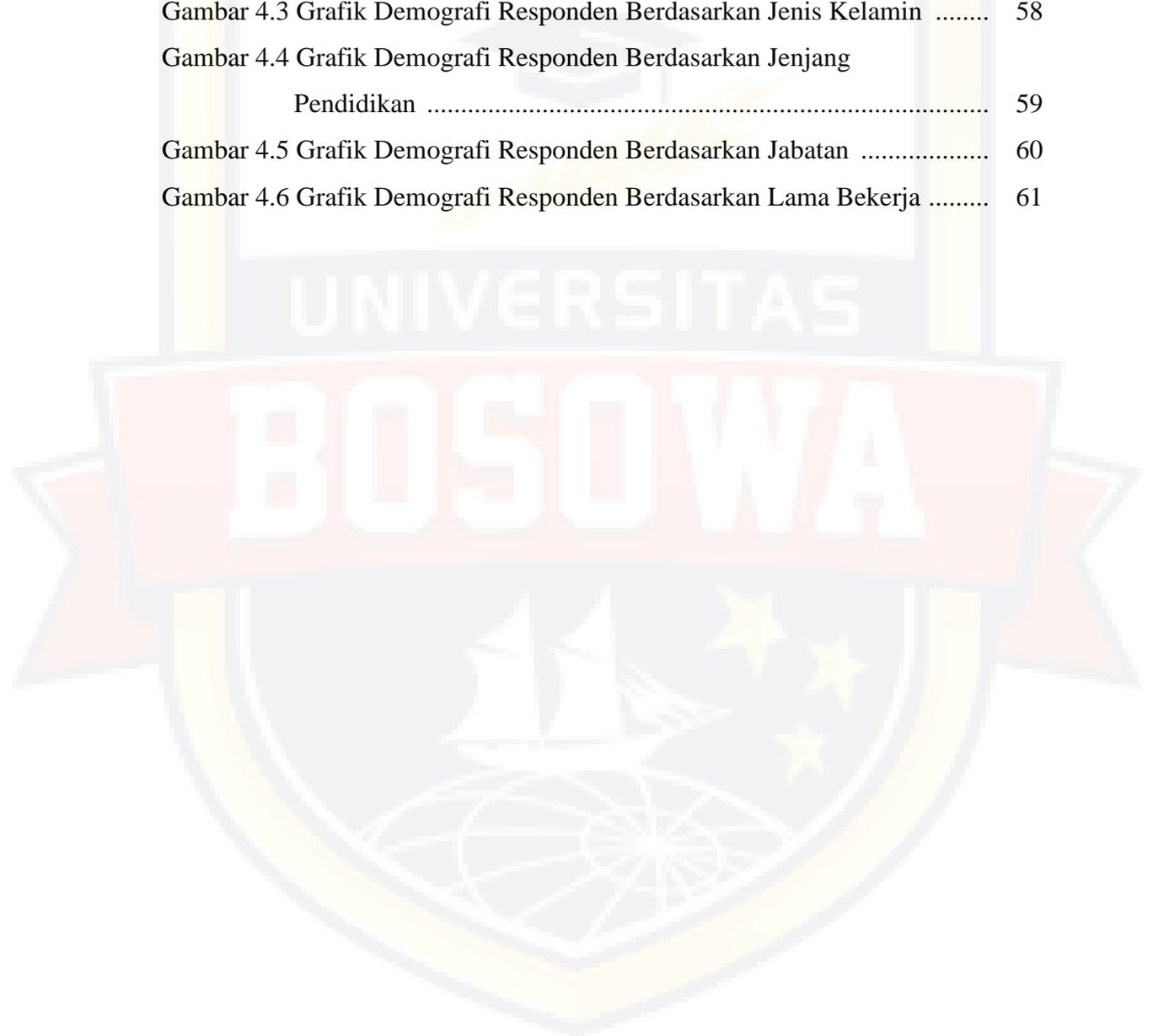


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jabatan dan Jumlah Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	6
Tabel 4.1 Pengembalian Kuesioner	56
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Usia	56
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	58
Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Jabatan	59
Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	60
Tabel 4.7 Analisis <i>Descriptive Statistics</i>	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Independensi Auditor Investigatif	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kemampuan Auditor Investigatif	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4.15 Model Persamaan Regresi	69
Tabel 4.16 Hasil Uji R^2 (Koefisien Determinasi)	70
Tabel 4.17 Hasil Uji t	71
Tabel 4.18 Hasil Uji F	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	52
Gambar 4.2 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Usia	57
Gambar 4.3 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Gambar 4.4 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	59
Gambar 4.5 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jabatan	60
Gambar 4.6 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, salah satu fenomena yang masih saja terjadi hingga saat ini adalah kecurangan (*fraud*). Kasus kecurangan terus meningkat dari tahun ke tahun di negara berkembang khususnya di Indonesia sehingga istilah kecurangan sudah tidak asing lagi bagi masyarakatnya. Banyaknya pengaduan dari masyarakat atau permintaan dari penyidik terkait dengan kecurangan menunjukkan bahwa praktik kecurangan masih merajalela. Kecurangan sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga dapat ditemukan di berbagai kondisi. Para pelakunya cenderung untuk mencari dan memanfaatkan kelemahan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, salah satu kasus kecurangan yang terkenal adalah kasus korupsi. Perilaku korupsi di Indonesia telah berada di tingkatan yang mengkhawatirkan sehingga korupsi menjadi tindakan kejahatan yang serius. Korupsi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya perkembangan dan kemajuan ekonomi, pendidikan, bahkan teknologi di Indonesia. Banyak orang menganggap bahwa korupsi bukan lagi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan atau sudah menjadi budaya di Indonesia. Pelaku yang paling banyak melakukan korupsi di Indonesia adalah yang berpendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan pendidikan tidak menjadi patokan seseorang tidak melakukan tindakan korupsi. Maraknya

kasus korupsi di Indonesia tentu menjadi sangat memalukan dan seakan negara Indonesia sulit untuk memberantas korupsi.

Dalam upaya mewujudkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan hasil yang cukup signifikan dengan meningkatnya jumlah kasus yang diserahkan ke penegak hukum, baik melalui audit investigasi, hasil perhitungan kerugian keuangan negara maupun pemberian keterangan ahli berupa kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah, serta mengaudit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara ataupun daerah. Selain BPKP, ada beberapa lembaga negara yang dapat mendeteksi adanya kecurangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga tersebut tentu terus mengupayakan kinerja yang optimal secara sistematis untuk mendeteksi adanya tindak kecurangan.

Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan, tentu tidak lepas dari gejala-gejala apa yang terjadi. Untuk mengenali sebuah kecurangan membutuhkan pembelajaran dan penggalian terhadap beberapa kasus yang telah terjadi, baik di perusahaan itu sendiri maupun di perusahaan lain. Gejala kecurangan dapat dilihat dari aspek manajemen dan karwayannya. Pada umumnya, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Biasanya juga manajemen selalu menutupi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku dalam organisasi, hal ini

membuat para pelaku merasa terlindungi. Oleh karena itu, dengan memahami gejala-gejala apa saja yang terjadi dapat mengidentifikasi kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi atau telah terjadi.

Namun akhir-akhir ini auditor menjadi sorotan bagi masyarakat disebabkan karena adanya beberapa auditor yang terseret dalam kasus suap. Hal ini menunjukkan integritas seorang auditor kurang. Dari pantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sejak 2005 sampai 2017, sedikitnya terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK. Sebanyak empat kasus suap terkait mendapatkan opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan, satu kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan satu kasus suap agar mengesampingkan temuan BPK yang mencurigakan. Nilai suap terkecil dalam kasus tersebut adalah Rp 80 juta dan nilai suap terbesar mencapai Rp 1,6 milyar. (<https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/29/05/2017/setelah-auditor-bpk-tersandung-korupsi/>)

Salah satu kasus suap yang melibatkan para auditor adalah yang terjadi pada tahun 2010 di daerah Jawa Barat, pada kasus ini dua auditor BPK dihukum empat tahun penjara. Kedua auditor BPK tersebut terbukti telah menerima uang sebesar Rp 400 juta dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi tahun 2009. Pemberian uang Rp 400 juta diberikan secara bertahap, yang pertama sebesar Rp 200 juta di lapangan parkir sebuah rumah makan dan tahap kedua diberikan oleh Kepala Inspektorat Kota Bekasi dan Kabid Aset dan Akuntansi Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah) kepada auditor BPK sebesar Rp 200 juta. (<https://www.antaraneews.com/berita/232501/auditor-bpk-jabar-divonis-empat-tahun>). Selain itu, terdapat juga kasus yang menyeret dua auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012. Kedua auditor tersebut diduga menerima uang suap sebesar Rp 1,5 milyar untuk membuat penilaian keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dari *Disclaimer* menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (<https://manado.tribunnews.com/2012/05/21/bahar-dan-munzir-divonis-45-tahun-dan-4-tahun-penjara>). Pada tahun 2017, terjadi kembali kasus suap yang menyeret dua auditor BPK RI. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terbukti memberikan suap senilai Rp 240 juta kepada auditor BPK agar Kemendes PDTT mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada kasus ini, pemberian Rp 240 juta diberikan secara bertahap. Pemberian suap diawali pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Pada 10 Mei 2017, uang sejumlah Rp 200 juta diberikan kepada Auditor BPK. Dan pemberian sisa uang selanjutnya diberikan pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 40 juta. (<https://tirto.id/kasus-suap-kemendes-pdtt-sugito-divonis-15-tahun-penjara-cy3n>)

Dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada auditor yang menyalahgunakan wewenangnya. Seorang auditor harus memiliki kompetensi yang handal dalam melaksanakan audit, terlebih lagi terhadap audit investigatif maka seorang auditor dituntut untuk independensi, integritas serta berwawasan luas di bidang keinvestigasian. Kegagalan seorang auditor dalam menjalankan

tugasnya membuktikan bahwa masih belum optimalnya kemampuan seorang auditor sehingga menyebabkan rusaknya penilaian masyarakat terhadap kinerja auditor.

Masalah dalam penelitian ini adalah profesi auditor yang belakangan ini disoroti oleh masyarakat akibat banyaknya terjadi kasus kegagalan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian tentang independensi dan kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan sangat penting karena tidak semua auditor menjalankan audit investigatif, hanya auditor-auditor tertentu saja. Dan membuktikan kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah bagi auditor. Seorang auditor investigatif harus mempunyai pengetahuan yang luas. Disamping menguasai akuntansi dan pengauditan, auditor investigatif harus mengetahui ketentuan hukum yang berlaku. Auditor dituntut untuk memiliki kemampuan memahami prosedur, aturan, dan kebijakan-kebijakan tertentu. Oleh karena itu, auditor harus didukung dengan kemampuan yang memadai untuk menunjang keberhasilannya.

Selain mempunyai pengetahuan luas, seorang auditor investigatif harus memiliki sikap independensi karena sikap tersebut merupakan hal yang sangat diperlukan bagi auditor dalam pengambilan keputusan. Penilaian masyarakat atas independensi auditor bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Namun, apabila seorang auditor gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar masyarakat beranggapan bahwa semua auditor tidak independen. Kecurigaan tersebut tentu dapat berakibat masyarakat meragukan integritas seorang auditor. Oleh karena itu, seorang auditor tidak hanya dituntut

untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)”**. Adapun data awal yang di dapat peneliti pada tempat penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jabatan dan Jumlah Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Jabatan Auditor	Jumlah Auditor
1.	Auditor Muda	42
2.	Auditor Pertama	44
3.	Auditor Penyelia	13
4.	Auditor Pelaksana	14
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	8
6.	Auditor Madya	17
Jumlah		138

Sumber: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah kemampuan auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan?

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah independensi auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah kemampuan auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

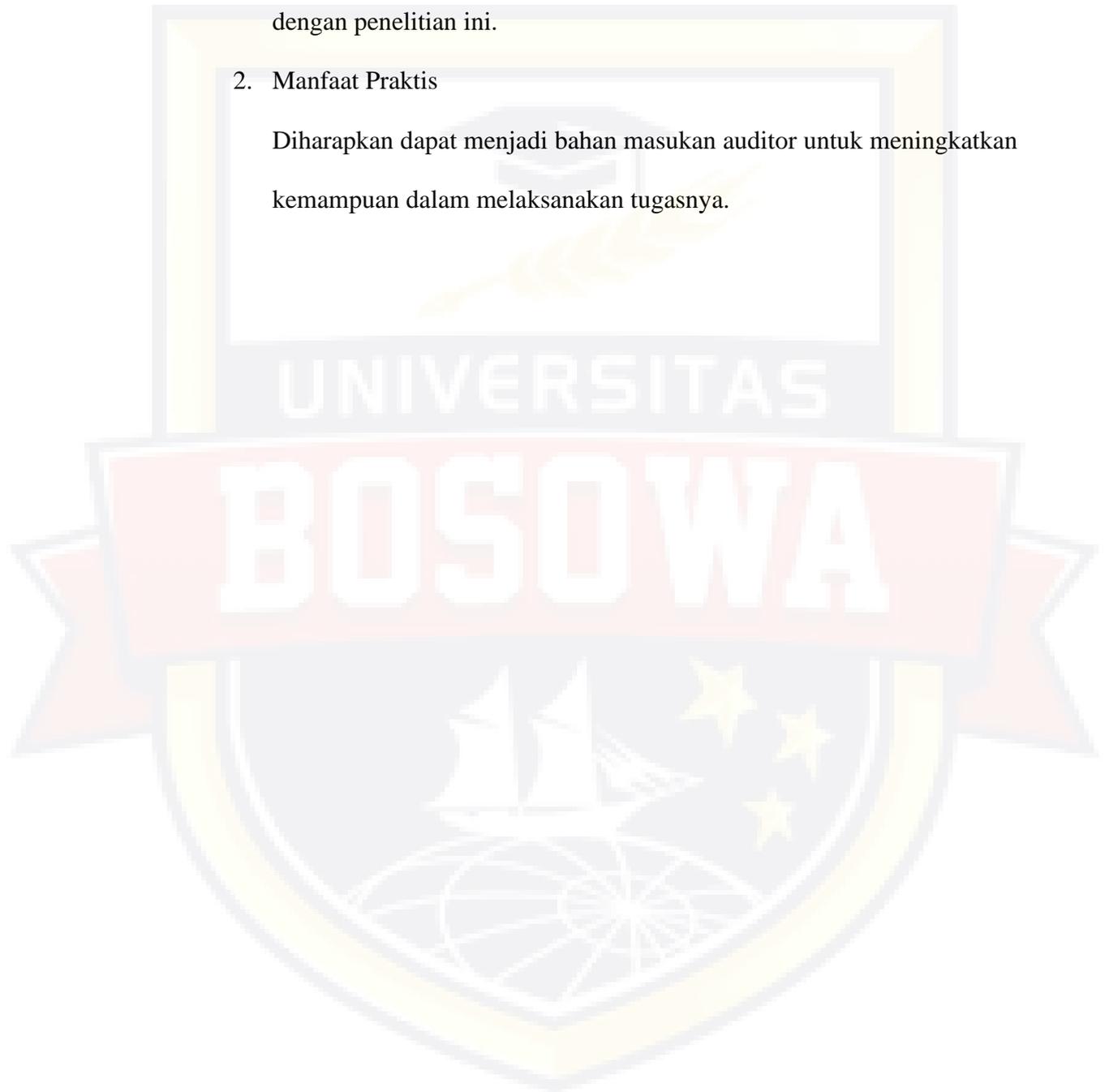
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembaca sekaligus menambah pemahaman dan wawasan, khususnya dibidang

audit investigasi. Dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan auditor untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung permasalahan penelitian dengan menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Pengertian *auditing* menurut Arens, dkk (2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Mulyadi (2014:9) mendefinisikan *auditing* secara umum sebagai berikut:

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Sedangkan, menurut Jusup (2014:10) pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

Auditing adalah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa *auditing* adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan dengan menyesuaikan pernyataan-pernyataan kegiatan ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Standar *Auditing*

Standar *auditing* merupakan aturan yang ditetapkan sebagai pedoman bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. Ada sepuluh standar *auditing* yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI). Sunyoto (2014:21) mengemukakan standar dalam *auditing* yang berlaku secara umum ada tiga, yaitu:

1. Standar Umum

Standar umum dalam *auditing* sebagai berikut:

- a. Audit harus dilakukan oleh seorang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
- c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan yang dimaksud adalah:

- a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan

karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.

- c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan yang dimaksud adalah:

- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
- d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor ini harus secara jelas (dalam laporan auditor)

menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

Auditor harus mematuhi standar yang telah ditetapkan. Karena standar *auditing* membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dikatakan berkompoten apabila dapat menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditing

Menurut Hery (2017:12) audit pada umumnya dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

2. Audit Pengendalian Internal

Audit pengendalian internal dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dari tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

3. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.

4. Audit Operasional

Audit operasional dilakukan untuk *mereview* (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen.

5. Audit Forensik

Audit forensik dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.1.4 Klasifikasi Auditor

Mulyadi (2014:28) menyatakan bahwa orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi:

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

3. Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

2.1.2 Audit Investigasi

2.1.2.1 Pengertian Audit Investigasi

Tuanakotta (2016:349) menyebutkan istilah audit investigasi sebagai berikut:

Istilah audit investigasi menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit investigasi lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh *opinion* audit. Audit investigasi diarahkan pada pembuktian ada atau tidak adanya *fraud* (termasuk korupsi) dan perbuatan melawan hukum lainnya (seperti tindak pidana pencucian uang).

Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Tahun 2012 untuk BPKP dalam Fadli (2017) mendefinisikan audit investigatif yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Sedangkan, menurut Pusdiklat BPKP (2008) dalam Wuysang, dkk (2016) audit investigatif adalah:

Sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa atau kejadian atau transaksi yang dapat memberikan kecukupan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pembuktian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

Dari beberapa definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan audit investigasi adalah proses mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang bertujuan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya suatu kecurangan yang selanjutnya dilakukan tindakan hukum.

2.1.2.2 Standar Audit Investigasi

Pickett dan Jennifer dalam buku Tuanakotta (2016:115-116) merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap *fraud*. Konteks yang

mereka rujuk adalah investigasi atas *fraud* yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan, yaitu:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (*accepted best practices*).
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (*due care*) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindung, dan diindeks, dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun kasus pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai laporan.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Audit Investigasi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008 dalam Rahmawati (2017) mengemukakan bahwa ada dua jenis audit investigatif, yaitu:

1. Audit Investigatif Proaktif

Dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara dan perekonomian negara.

2. Audit Investigatif Reaktif

Audit investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara dan perekonomian negara.

Pratiwi (2015) menyatakan bahwa hasil dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

2.1.2.4 Aksioma Audit Investigasi

Tuanakotta (2016:322-324) mengemukakan pengertian aksioma sebagai berikut:

Aksioma atau *postulate* adalah pernyataan (*proposition*) yang tidak dibuktikan atau tidak diperagakan, dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (*self-evident*). Kebenaran dari proposisi ini tidak dipertanyakan lagi (*taken for granted*). Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan (melalui pembentukan teori).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebut tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan *fraud*. Ketiga aksioma ini oleh ACFE diistilahkan *fraud axioms* (aksioma *fraud*), yang terdiri atas:

1. *Fraud is Hiden*

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan *fraud* adalah tersembunyi. Metode atau modus operandinya mengandung tipuan, untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya *fraud*. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung. Metode untuk menyembunyikan *fraud* begitu banyak, pelaku *fraud* sangat kreatif mencari celah-celah untuk menyembunyikan kecurangannya, sehingga investigator yang berpengalaman pun sering terkecoh. Memberikan pendapat bahwa *fraud* terjadi (padahal *fraud* tidak terjadi) atau sebaliknya, memberikan pendapat bahwa *fraud* tidak terjadi (padahal sebenarnya *fraud* terjadi), membuat investigator (pemeriksa *fraud*) berisiko menghadapi tuntutan hukum.

2. *Reverse Proof*

Reverse proof secara harfiah berarti pembuktian secara terbalik atau istilah hukumnya pembalikan beban pembuktian. ACFE menjelaskan bahwa pemeriksaan *fraud* didekati dari dua arah. Untuk membuktikan *fraud* memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi. Dan sebaliknya, dalam upaya membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi.

3. *Existence of Fraud*

Aksioma ini mengatakan bahwa hanya pengadilan yang dapat (berhak) menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi atau tidak terjadi.

2.1.2.5 Sasaran dan Target Audit Investigasi

Rokhmawati (2018) menyatakan bahwa tujuan audit dapat tercapai secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan audit investigatif adalah dengan menentukan sasaran dan target secara cermat. Adapun sasaran audit investigatif adalah:

1. Subjek yaitu pelaku, saksi, dan ahli. Dalam pengungkapan kecurangan harus diungkap siapa pelakunya sehingga pelaku kecurangan tersebut merupakan subjek utama. Auditor harus dapat menunjukkan subjek yang dapat dijadikan saksi dan pemberi keterangan ahli jika hasil audit investigasi ditindaklanjuti ke litigasi.

2. Objek, yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil dari kecurangan dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindak kecurangan.

3. Modus operandi, adalah proses kecurangan di mana melakukan kecurangan dengan mengungkap urutan atau proses terjadinya kecurangan, unsur pelanggaran hukum atau aturan, kapan dan di mana terjadinya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan pengumpulan bukti dengan berbagai teknik audit dan teknik investigasi. Adapun target audit investigasi, yaitu mengamankan kekayaan organisasi atau entitas yang menjadi korban kecurangan, mengamankan aset hasil kecurangan sebagai barang bukti jika ditindaklanjuti ke tingkat litigasi, dan menindak para pelakunya.

2.1.2.6 Prinsip Audit Investigasi

Karyono (2013:134) dalam Rahmawati (2017) mengatakan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan audit investigatif adalah:

1. Mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan sumber bukti pendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Selang waktu kejadian dengan respon, semakin cepat merespon, semakin besar kemungkinan untuk dapat mengungkap tindak *fraud* besar.
4. Dikumpulkan fakta terjadinya sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat mengungkap terjadinya *fraud* dan menunjukkan pelakunya.

5. Tenaga ahli hanya sebagai bantuan bagi pelaksanaan audit investigasi, bukan merupakan pengganti audit investigasi.
6. Bukti fisik merupakan bukti nyata dan akan selalu mengungkap hal yang sama.
7. Keterangan saksi perlu dikonfirmasi karena hasil wawancara dengan saksi dipengaruhi oleh faktor kelemahan manusia.
8. Pengamatan, informasi, dan wawancara merupakan bagian penting dari audit investigasi.
9. Pelaku penyimpangan adalah manusia, jika diperlukan dengan bijak sebagaimana layaknya ia akan merespon sebagaimana manusia.

Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar atau acuan yang perlu dilaksanakan setiap melakukan audit investigasi. Dengan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu pelaksanaan audit investigasi lebih efisien.

2.1.2.7 Prosedur Audit Investigasi

Tuanakotta (2016:330) menyatakan bahwa langkah pertama akuntan forensik dalam audit investigatifnya adalah menyusun *predication*. *Fraud*

Examiners Manual menjelaskan *predication* sebagai berikut:

“Predication is the totality of circumstances that would lead a reasonable, professionally trained, and prudent individual to believe a fraud has occurred, is occurring, and/or will occur. Predication is the basis upon which examination is commenced. Fraud examination should not be conducted without predication”

Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa *fraud* telah, sedang, atau akan berlangsung. *Predication* adalah dasar untuk memulai investigasi. Investigasi atau pemeriksaan *fraud* jangan dilaksanakan tanpa adanya *predication* yang tepat.

BPKP dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) Tahun 2012 dalam Fadli (2017) mengelompokkan tahapan audit investigatif sebagai berikut:

1. Tahap Pra Perencanaan

Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan unit kerja untuk menentukan unit kerja akan melakukan atau tidak melakukan penugasan bidang investigasi. Penugasan bidang investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup dan penugasan dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan atau ekspose terlebih dahulu atas informasi awal yang diterima.

2. Tahap Perencanaan

Dalam setiap penugasan investigasi, auditor harus menyusun rencana penugasan, yang mana di dalam rencana penugasan tersebut auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya. Apabila diperlukan, penugasan bidang investigasi dapat direncanakan penggunaan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu. Auditor merencanakan prosedur audit untuk melakukan pengendalian yang memadai atas tenaga ahli lain yang digunakan tersebut guna memperoleh keyakinan bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat digunakan sebagai bahan penugasan bidang investigasi.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengumpulan dan evaluasi bukti

Dalam melaksanakan audit, ada tiga kriteria bukti yang dikumpulkan yang harus dipenuhi oleh auditor, yaitu cukup,

kompeten, dan relevan. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang memadai.

b. Supervisi, *review meeting*, dan pembahasan intern

Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit. Pengendalian penugasan melalui *review* berjenjang, *review meeting*, dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.

c. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan

Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada objek penugasan, dan bukan merupakan pembahasan hasil audit.

d. Pengelolaan kertas kerja audit

Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di BPKP. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-

angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.

4. Tahap Pelaporan

Laporan hasil audit investigatif (LHAI) harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Laporan hasil audit harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan, alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap simpulan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.

5. Tahap Tindak Lanjut

Pimpinan unit kerja melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan tindak lanjut (TL) atas laporan hasil penugasan bidang investigasi, serta melakukan rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan hasil audit.

2.1.2.8 Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit Investigasi

Pratiwi (2015) menyatakan bahwa penyusunan laporan merupakan sebuah tahap akhir dalam suatu audit investigatif, laporan ini akan menyajikan temuan dan informasi penting lainnya yang dapat mengungkap dugaan *fraud* secara jelas. Jika dalam proses audit investigatif ditemukan adanya suatu penyimpangan yang membutuhkan tindak lanjut maka laporan akan dibuat dalam bentuk bab, namun jika tidak ditemukan suatu penyimpangan maka cukup dengan menerbitkan surat yang menjelaskan tidak adanya tindak pidana pada kasus yang telah diaudit.

Ketika terdapat indikasi suatu penyimpangan dalam melaksanakan audit, maka tim audit investigatif akan mengeksposekan materi dalam laporan hasil audit investigatif, ekspose dilakukan secara intern di hadapan para pejabat yang terkait, dengan menyertakan pejabat perwakilan dari biro hukum. Dan kelanjutan dari hasil tersebut, kepala unit pengawasan akan mengadakan pemaparan dengan mengundang pihak lembaga penegak hukum lainnya, untuk memantapkan temuan auditor dan menghasilkan keputusan mengenai kepastian terjadinya tindak pidana.

2.1.3 Independensi Auditor

Ardianingsih (2018:25) menyatakan independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk dipenuhi oleh seorang auditor, untuk kewajiban atas kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen.

Sedangkan, independensi menurut Mulyadi (2014:26) adalah:

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut, sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya, dan mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. Jesika, dkk (2015) menyatakan bahwa ada tiga aspek independensi, yaitu sebagai berikut:

1. *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi.
2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan auditor. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya.
3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Buku “*The Phylosophy of Auditing*” karya Mautz dan Sharaf dalam Pratiwi (2017) memberikan beberapa indikator independensi sebagai berikut:

1. Independensi dalam Program Audit
 - a. Bebas dari intervensi manajerial dalam program audit.
 - b. Bebas dari segala intervensi dalam prosedur audit.
 - c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.
2. Independensi dalam Verifikasi
 - a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
 - b. Mendapat kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit.

- c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti.
- d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.

3. Independensi dalam Pelaporan

- a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
- b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit.
- c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
- d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

2.1.4 Kemampuan Auditor

Tuanakotta (2016:104) mengemukakan bahwa auditor investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi yaitu harus memiliki kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Disamping keahlian teknis, seorang auditor investigasi harus mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil (*fair*), tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap.

Tuanakotta (2007:349) dalam Pratiwi (2015) mengemukakan indikator seorang auditor investigatif yang merupakan gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. Adapun beberapa persyaratan kemampuan atau yang harus dipenuhi oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigatif sebagai berikut:

1. Pengetahuan Dasar
 - a. Memilih *background* ilmu akuntansi dan *auditing*.
 - b. Menguasai teknik sistem pengendalian intern.
 - c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
 - d. Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma audit investigatif, prinsip-prinsip audit investigatif dan kecurangan, teknik audit investigatif dan cara memperoleh bukti.
 - e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi.
 - f. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.
 - g. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (*hardware, software, maupun sistem*), serta memahami tentang *cyber crime*. Memiliki jiwa skeptisme profesional, sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.
 - h. Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dalam menindaklanjuti kasus yang akan datang.

2. Kemampuan Teknis

- a. Auditor menggunakan ahli *information technologi* (IT), untuk pengetahuan yang cukup dan luas.
- b. Auditor harus mengetahui konstruksi hukum (undang-undang).
- c. Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.
- d. Mampu bertindak objektif dan independen, serta netral, dan selalu menjunjung asas praduga tak bersalah.
- e. Memiliki kemampuan membuat hipotesis.
- f. Mampu mengumpulkan bukti untuk membuktikan hipotesis.

3. Sikap Mental

- a. Mengikuti standar audit investigatif.
- b. Bersikap independen.
- c. Bersifat bebas dengan skeptik profesional.
- d. Bersifat kritis.

2.1.5 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit

Fadli (2017) mendefinisikan kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Tercapainya efektivitas pelaksanaan prosedur audit dapat didukung dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik audit.

Wahono (2011:1) dalam Pratiwi (2015) menyimpulkan prosedur audit dimulai dengan tahap penelaahan informasi awal, perencanaan pemeriksaan investigatif, pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pelaporan dan tindak lanjut. Dalam tahap awal yang dilakukan oleh auditor investigatif adalah dengan menelaah informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat, media, maupun pihak penegak hukum. Dari informasi tersebut auditor investigatif akan memutuskan apakah cukup bukti untuk melakukan audit investigatif dalam pembuktian kecurangan. Selanjutnya, auditor investigatif akan melakukan susunan tim dan lain-lainnya, kemudian melaksanakan audit investigatif. Tetapi sebelum itu, auditor investigatif berkonsultasi terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum agar langkah-langkah dan proses audit serta bukti yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tuanakotta (2016:239) menyatakan bahwa teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat tujuh teknik audit investigatif menggunakan teknik audit, yaitu:

1. Memeriksa fisik (*physical examination*)

Memeriksa fisik atau *physical examination* dapat diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, barang berwujud lainnya, atau fisik suatu barang yang menjadi objek dari *fraud* yang dicurigai terjadi atau tidak terjadi.

2. Meminta konfirmasi (*confirmation*)

Meminta konfirmasi dapat dilakukan secara lisan. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain yang dalam hal ini dapat merupakan *auditee*

maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi.

3. Memeriksa dokumen (*documentation*)

Pemeriksaan dokumen dilakukan tanpa teknik khusus dalam audit investigatif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen terkait permasalahan yang hendak diuji kebenarannya serta termasuk mengamankan dokumen yang terkait.

4. *Review* analitikal (*analytical review*)

Review analitikal adalah bentuk penalaran deduktif yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasny suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara menyeluruh. *Review* analitikal meliputi perbandingan antara suatu data menurut catatan dengan apa yang wajar atau layaknya harus terjadi termasuk membandingkannya dengan apa yang dihadapi, dan berusaha menjawab sebab terjadinya kesenjangan, apakah terjadi kesalahan atau *fraud*.

5. Meminta konfirmasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of the auditee*)

Permintaan informasi dari *auditee* dilakukan untuk memperjelas suatu informasi yang awalnya belum diketahui atau masih belum jelas. Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain untuk memastikan keabsahan informasi yang didapat.

6. Menghitung kembali (*reperformance*)

Menghitung kembali pada dasarnya adalah memeriksa kembali kebenaran perhitungan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa angka-angka yang tertera atau tercantum telah benar dan bebas dari kesalahan klerikal.

7. Mengamati (*observation*)

Mengamati dapat diartikan sebagai penggunaan indera untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Mengamati perlu dilakukan untuk memahami atau mengetahui objek terjadinya atau tidak terjadinya *fraud*.

Dari penjelasan tersebut, maka auditor investigatif harus melakukan prosedur dan teknik secara bertahap. Dan apabila auditor investigatif mempunyai sifat independensi dan kemampuan yang memadai, maka audit investigasi yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan akan berjalan secara efektif.

2.1.6 Kecurangan

2.1.6.1 Pengertian Kecurangan

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Budiasri (2017) *fraud* adalah:

Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain

Sedangkan, menurut Zimbelman, dkk (2014:11) mendefinisikan secara umum kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh

seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.

Dari definisi di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa *fraud* adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja agar mendapatkan keuntungan tetapi merugikan orang lain.

Ardianingsih (2018:74) mengemukakan unsur-unsur *fraud* yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Kecurangan

ACFE dalam Ardianingsih (2018:75) mengelompokkan *fraud* menjadi empat hal berikut:

1. Kecurangan laporan yang terdiri dari kecurangan laporan keuangan dan kecurangan laporan lainnya. Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya. Laporan keuangan *over stated* dilakukan dengan melaporkan aset dan pendapatan lebih besar dari sebenarnya.
2. Penyalahgunaan aset yang terdiri dari kecurangan kas, serta kecurangan persediaan, dan aset lainnya.
3. Korupsi yang terdiri dari atas pertentangan kepentingan, penyuaipan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.

2.1.6.3 Penyebab Kecurangan

Arens, dkk (2015:398) menyatakan bahwa tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang, ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

1. Insentif atau Tekanan

Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Perusahaan juga mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi perkiraan atau tolak ukur, atau untuk secara semu menaikkan harga saham.

2. Kesempatan

Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji.

3. Sikap atau Rasionalisasi

Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses laporan keuangan, maka pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi.

2.1.6.4 Pencegahan Kecurangan

Ardianingsih (2018:82) menyatakan kecurangan yang teridentifikasi dan terdeteksi ada dalam sebuah perusahaan dapat dicegah dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko

Seorang auditor dalam mendeteksi *fraud* seharusnya harus mengenali apa saja yang menyebabkan terjadinya *fraud*, dan bagaimana tindakan manajemen dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*. Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidakpastian yang identik dengan risiko sehingga manajemen harus bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka manajemen harus yakin bahwa proses pengelola risiko telah berjalan dengan baik.

2. Mendeteksi *fraud* dengan mengidentifikasi gejala *fraud*

Gejala-gejala *fraud* dapat dilihat dari keganjilan akuntansi, kelemahan pengendalian intern, penyimpangan analisis, gaya hidup berlebihan, kelakuan tidak biasa, dan pengaduan.

3. Mendeteksi *fraud* dengan identifikasi bendera merah (*red flags*)

Deteksi kecurangan (*fraud*) dapat juga dilakukan dengan melakukan identifikasi karakteristik tertentu yang merupakan peringatan dini (*red flags*). Pelaku kecurangan biasanya dilakukan oleh manajemen dan tingkatan yang lebih rendah.

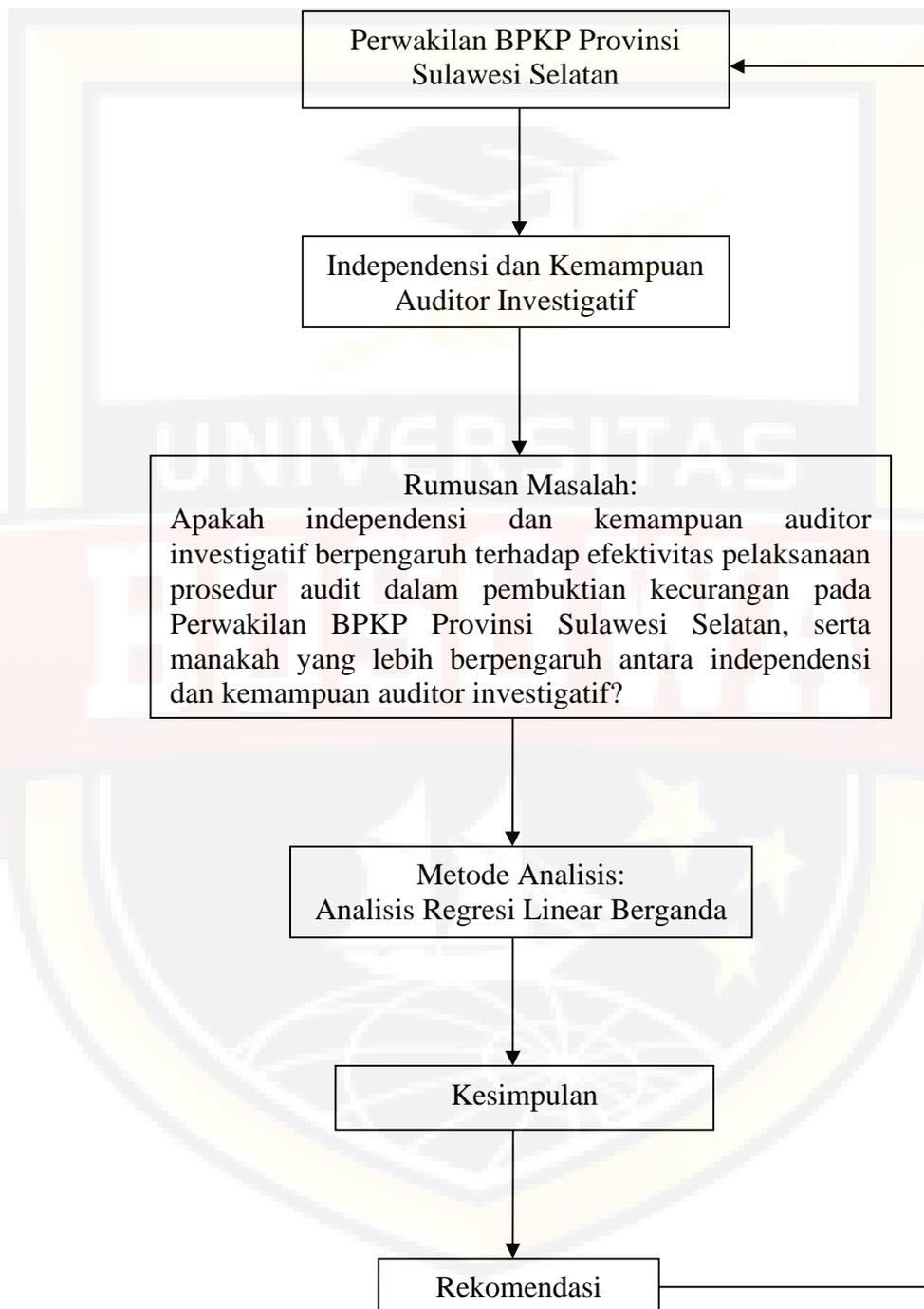
2.1.6.5 Pembuktian Kecurangan

Menurut Karyono (2013:153) dalam Rahmawati (2017) menjelaskan bahwa bukti merupakan semua alat yang digunakan untuk menyusun dugaan atas fakta atau menyangkalnya. Pada audit investigasi, auditor harus memiliki bukti yang kuat karena bukti-bukti tersebut digunakan untuk kebutuhan dalam proses persidangan. Menurut Zimbelman, dkk (2014:409) ada empat jenis bukti yang dapat diakumulasi dalam investigasi kecurangan, yaitu:

1. Bukti testimonial, yang dikumpulkan dari individu. Teknik investigasi secara khusus digunakan untuk mengumpulkan bukti testimonial adalah wawancara, interogasi, dan uji kejujuran.
2. Bukti dokumentasi, yang dikumpulkan dari dokumentasi tertulis, program komputer, dan sumber tertulis atau tercetak lainnya. Beberapa teknik investigasi yang umum digunakan untuk mengumpulkan bukti ini antara lain pengujian dokumen, pengumpulan data, pencarian catatan publik, audit, pencarian menggunakan komputer, perhitungan kekayaan bersih, dan analisis laporan keuangan.
3. Bukti fisik, meliputi sidik jari, jejak kendaraan, senjata, properti yang dicuri, nomor identifikasi atau tanda pada barang yang dicuri, dan bukti nyata lainnya yang dapat dihubungkan dengan tindakan yang tidak jujur.
4. Pengamatan pribadi, meliputi bukti-bukti yang dirasakan (dilihat, didengar, dirasa, dan lain-lain) oleh investigator itu sendiri.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga independensi auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga kemampuan auditor investigatif yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar. Adapun waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juli 2019.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sekaran dan Bougie (2016:236) menyatakan bahwa "*The population refers to the entire group of people, events, or things of interest that the researcher wishes to investigate*". Yang dapat diartikan populasi mengacu pada keseluruhan orang, kejadian-kejadian, atau minat terhadap suatu hal yang ingin peneliti investigasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah auditor investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 30 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *nonprobability sampling*. Hikmawati (2017:66) menyatakan bahwa *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampel digunakan pada penelitian ini adalah teknik

sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Hikmawati 2017:69).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk nilai atau tidak dapat dihitung melainkan diperoleh dalam bentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lainnya.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada tempat dilakukannya penelitian. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada auditor investigatif Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi responden pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara. Seperti melalui web mengenai gambaran umum perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. *Field research* (penelitian lapangan)

Field research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada tempat penelitian.

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas atau yang berhubungan dengan penelitian yang terjadi pada tempat penelitian.
- b. Kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 24. Setelah data-data terkumpul, maka dilakukan analisis data yang terdiri dari:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga dapat memberikan informasi. Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti mean, simpangan baku, varians, *range*, dan sebagainya.

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Ghozali (2018:51) menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang ingin diukur. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu *item* digunakan, maka dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 artinya suatu *item* dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total *item*.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45-46) menyatakan bahwa reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dilihat dari besaran *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria yaitu jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika $\text{sig} < 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan syarat nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $\text{VIF} < 10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidaknya *variance* dari residual observasi yang satu ke observasi lain. Jika residual mempunyai *variance* yang sama maka terjadi homoskedastisitas, sedangkan jika *variance* tidak sama maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika terjadi homoskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan metode *Scatter Plot*, yaitu menampilkan nilai prediksi dan nilai residu.

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit

a : Konstanta

b₁ : Koefisien Regresi

X₁ : Independensi Auditor Investigatif

X₂ : Kemampuan Auditor Investigatif

e : Error

2. Uji R² (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu. Jika R² mendekati nol maka menunjukkan kecilnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika R² mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3. Uji Statistik t

Uji t disebut juga dengan uji parsial. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t juga digunakan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak.

4. Uji Statistik F

Uji F disebut juga dengan uji serentak atau uji model. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

3.6 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu independensi dan kemampuan auditor investigatif. Sedangkan, variabel terikat yaitu efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

1. Independensi Auditor Investigatif

Dalam penelitian ini independensi auditor menjadi variabel X_1 . Menurut Mulyadi (2014:26) independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Dalam buku "*The Philosophy of Auditing*" karya Mautz dan Sharaf memberikan beberapa indikator independensi,

yaitu independensi dalam program audit, independensi dalam verifikasi, dan independensi dalam pelaporan.

2. Kemampuan Auditor Investigasi

Tuanakotta (2016:104) mengemukakan bahwa auditor investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi yaitu harus memiliki kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Adapun beberapa persyaratan kemampuan atau yang harus dipenuhi oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigatif, yaitu memiliki pengetahuan dasar, memiliki kemampuan teknis, dan memiliki sikap mental.

3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tercapainya efektivitas pelaksanaan prosedur audit dapat didukung dengan menerapkan prosedur audit dan teknik-teknik audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.1 Sejarah Singkat BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN)

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha atau jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara atau daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan, audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan *Memorandum of Understanding* (Mou) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen atau lembaga sebagai mitra kerja BPKP. Mou tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara atau daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara atau daerah, meliputi:

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara atau daerah;
- e. Audit dan evaluasi terhadap program atau kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah;

- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

4.1.2 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi

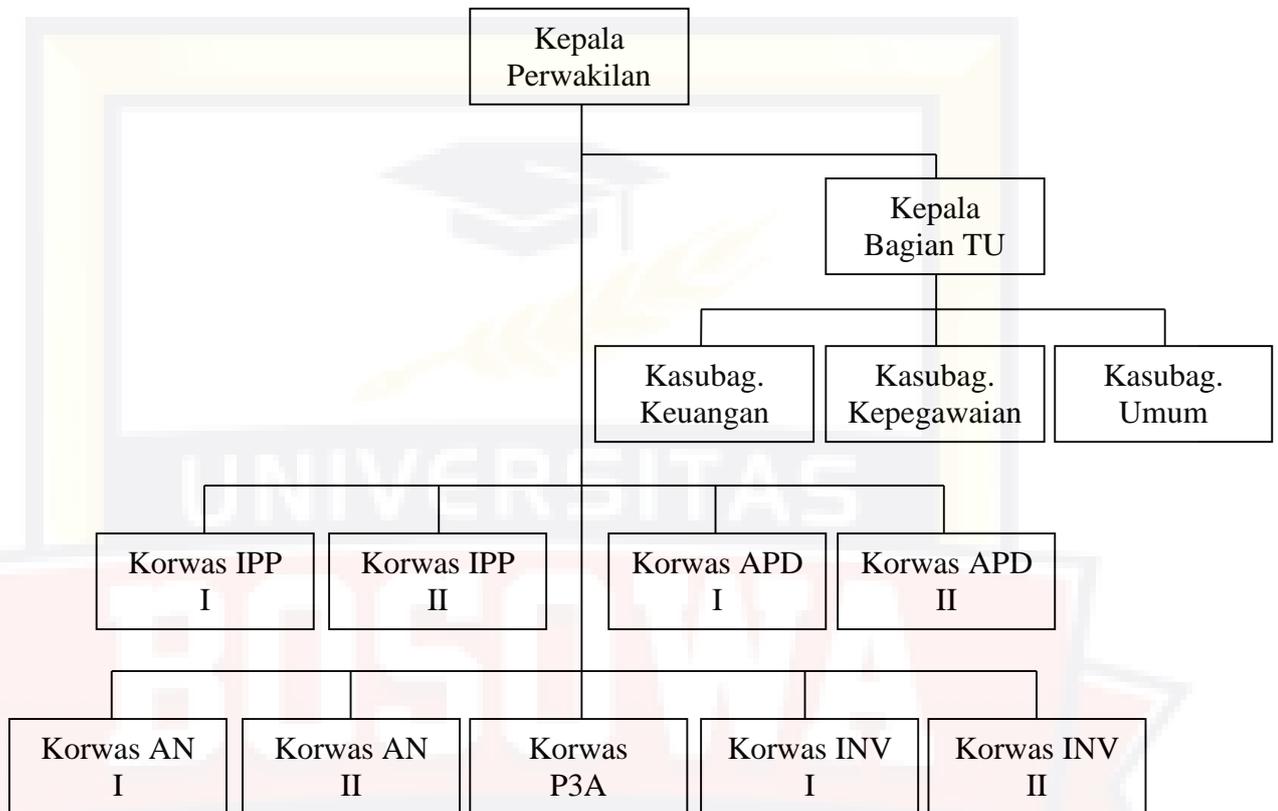
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
- b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan
- c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan

Bertugas menjalankan kebijakan umum termasuk didukungnya dalam hal pengambilan keputusan dan mengadakan kerja yang ada dalam instansi atau kantor.

2. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan, rumah tangga, pengelola perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan. Adapun bagian tata usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian, mendukung kegiatan pengawasan melalui: membuat daftar susunan pegawai (DSP), pengelolaan data dan informasi kepegawaian, menyusun usulan pengangkatan dan kepangkatan pegawai, menyusun usulan kenaikan gaji berkala pegawai, menyusun laporan bulanan pelaksana GDN perwakilan, memproses izin cuti bagi pegawai, dan melaksanakan aplikasi sistem informasi pegawai (simpeg) perwakilan.
- b. Sub Bagian Keuangan, mendukung kegiatan pengawasan melalui: menyusun bahan pembahasan anggaran rutin dan revisi anggaran, melaksanakan verifikasi keuangan anggaran, melaksanakan verifikasi penggajian dan perjalanan dinas.
- c. Sub Bagian Umum, mendukung kegiatan pengawasan melalui: menyelenggarakan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan, melaksanakan penggandaan, pengelolaan barang dan jasa termasuk inventaris kekayaan milik negara, melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik, melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, menyusun daftar analisa dan kebutuhan rumah tangga perwakilan, melaksanakan penggandaan, penjilitan,

pengiriman dan pengarsipan laporan hasil kegiatan pengawasan, mengkoordinasikan pengaman kantor dan lingkungannya, melaksanakan aplikasi program SABMN perwakilan penyusunan laporan berkala dan laporan tupoksi sub bagian kepegawaian.

3. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP)

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman atau bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

4. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidang Akuntan Negara (AN)

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, pertamina, cabang usaha pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

6. Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A)

Melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis (Renstra) perwakilan.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan program kerja informasi umum.
- c. Menyusun penempatan kinerja (Tapkin) serta revisi renja perwakilan.
- d. Menyusun rencana kinerja (Renja) serta renja perwakilan.
- e. Menyusun laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lapkin) perwakilan.
- f. Menyusun laporan kinerja triwulan.
- g. Menyusun laporan realisasi Rencana Kinerja Tahun (RKT) bulanan.
- h. Melaksanakan aplikasi program sistem informasi manajemen BPKP.

7. Bidang Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor investigatif yang bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 30 kuesioner dan jumlah yang kembali sebanyak 30 kuesioner, sehingga tingkat pengembalian sebesar 100%.

Tabel 4.1 Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	30	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang digunakan	30	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, jabatan, dan lama bekerja. Data karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini disajikan tabel demografi responden berdasarkan usia:

Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	20 - 30 Tahun	13	43%
2.	31 - 40 Tahun	8	27%
3.	> 40 Tahun	9	30%
Jumlah		30	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Gambar 4.2 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 20 - 30 tahun yaitu sejumlah 13 auditor (43%), diikuti responden yang berusia > 40 tahun berjumlah 9 auditor (30%). Kemudian auditor dengan jumlah paling sedikit berdasarkan usia adalah 31 - 40 tahun yaitu berjumlah 8 auditor (27%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	Laki-Laki	18	60%
2.	Perempuan	12	40%
Jumlah		30	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Gambar 4.3 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 auditor (60%) dan responden berjenis perempuan yaitu sebanyak 12 auditor (40%). Dari angka tersebut menggambarkan bahwa jumlah responden laki-laki pada penelitian ini lebih banyak daripada responden perempuan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	D3	7	23%
2.	S1	21	70%
3.	S2	2	7%
4.	S3	0	-
Jumlah		30	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Gambar 4.4 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai auditor investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mayoritas responden adalah dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 auditor (70%), kemudian diikuti responden dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 7 auditor (23%), dan responden dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 auditor (7%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berikut disajikan demografi responden berdasarkan jabatan:

Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	Auditor Muda	4	13%
2.	Auditor Pertama	15	50%
3.	Auditor Penyelia	5	17%
4.	Auditor Pelaksana	2	7%
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	3%
6.	Auditor Madya	3	10%
Jumlah		30	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Gambar 4.5 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa auditor yang mempunyai jabatan sebagai auditor pertama sebanyak 15 auditor (50%), memiliki jabatan sebagai auditor penyelia sebanyak 5 auditor (17%), memiliki jabatan sebagai auditor muda sebanyak 4 auditor (13%), memiliki jabatan sebagai auditor madya sebanyak 3 auditor (10%), memiliki jabatan sebagai auditor pelaksana sebanyak 2 auditor (7%), dan memiliki jabatan sebagai auditor pelaksana lanjutan sebanyak 1 auditor (3%).

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

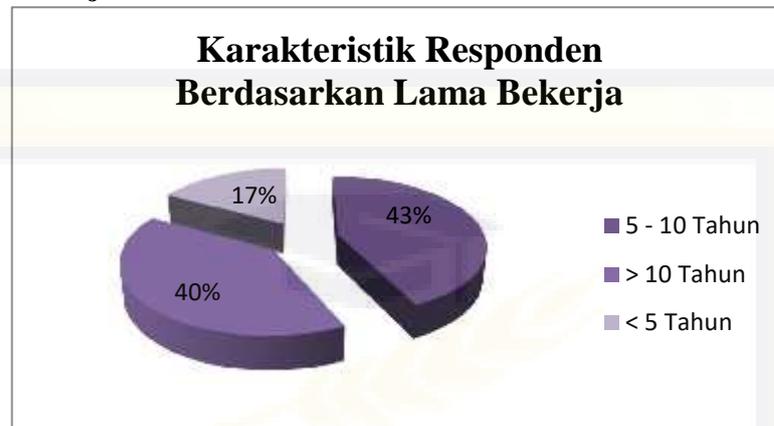
Berikut disajikan demografi responden berdasarkan lama bekerja:

Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Lama Bekerja	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	< 5 Tahun	5	17%
2.	5 – 10 Tahun	13	43%
3.	> 10 Tahun	12	40%
Jumlah		30	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Gambar 4.6 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden bekerja selama 5 - 10 tahun sebanyak 13 auditor (43%) diikuti responden yang bekerja selama > 10 tahun sebanyak 12 auditor (40%), dan responden yang bekerja < 5 tahun sebanyak 5 auditor (17%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Independensi Auditor Investigatif, Kemampuan Auditor Investigatif, dan Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan. Variabel-variabel tersebut akan diuji dengan uji statistik deskriptif.

Tabel 4.7 Analisis *Descriptive Statistics*

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi Auditor	30	2,80	4,00	3,4833	,42918
Kemampuan Auditor	30	3,00	4,00	3,3800	,36427
Efektivitas	30	3,00	4,00	3,4233	,33392

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

0-1,0 = Sangat Tidak Setuju

1,1-2,0 = Tidak Setuju

2,1-3,0 = Setuju

3,1-4,0 = Sangat Setuju

Tabel di atas menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Independensi Auditor Investigatif (X_1)

Berdasarkan tabel di atas X_1 memiliki nilai mean 3,48 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,429 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2. Kemampuan Auditor Investigatif (X_2)

Berdasarkan tabel di atas X_2 memiliki nilai mean 3,38 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,364 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Y)

Berdasarkan tabel di atas Y memiliki nilai mean 3,42 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,333 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu *item* itu digunakan, maka dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*. Hasil uji validitas untuk setiap instrumen adalah sebagai berikut:

a. Independensi Auditor Investigatif

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Independensi Auditor Investigatif

No. Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	0,597	0,355	Valid
2.	0,731	0,355	Valid
3.	0,812	0,355	Valid
4.	0,717	0,355	Valid
5.	0,701	0,355	Valid
6.	0,703	0,355	Valid
7.	0,724	0,355	Valid
8.	0,712	0,355	Valid
9.	0,702	0,355	Valid
10.	0,442	0,355	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen Independensi Auditor Investigatif dengan menggunakan *software* SPSS pengolahan data, semua *item* memiliki nilai korelasi *Product Moment* (r_{hitung}) pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,355 (tarif signifikan 5% dengan $n=31$) sehingga dinyatakan valid.

b. Kemampuan Auditor Investigatif

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kemampuan Auditor Investigatif

No. Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	0,735	0,355	Valid
2.	0,782	0,355	Valid
3.	0,549	0,355	Valid
4.	0,832	0,355	Valid
5.	0,815	0,355	Valid
6.	0,812	0,355	Valid
7.	0,890	0,355	Valid
8.	0,732	0,355	Valid
9.	0,651	0,355	Valid
10.	0,857	0,355	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen Kemampuan Auditor Investigatif dengan menggunakan *software* SPSS pengolah data, semua *item* memiliki nilai korelasi *Product Moment* (r_{hitung}) pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,355 (tarif signifikan 5% dengan $n=31$) sehingga dinyatakan valid.

c. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

No. Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	0,784	0,355	Valid
2.	0,849	0,355	Valid
3.	0,644	0,355	Valid
4.	0,784	0,355	Valid
5.	0,786	0,355	Valid
6.	0,815	0,355	Valid
7.	0,717	0,355	Valid
8.	0,797	0,355	Valid
9.	0,784	0,355	Valid
10.	0,762	0,355	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan dengan menggunakan *software* SPSS pengolah data, semua item memiliki nilai korelasi *Product Moment* (r_{hitung}) pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,355 (tarif signifikan 5% dengan $n=31$) sehingga dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Independensi Auditor Investigatif	0,874	Reliabel
Kemampuan Auditor Investigatif	0,917	Reliabel
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan	0,922	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen yang menyatakan seluruh instrumen variabel penelitian dinyatakan reliabel karena koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi $> 5\%$ atau 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,20775187
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,158
	Positive	,158
	Negative	-,110
Test Statistic		,158
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Data Primer yang Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,055. Oleh karena itu, nilai signifikansi $>$ $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penelitian.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat melihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $>$ 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	9,353	4,243		2,204	,036		
	independensi	,276	,119	,354	2,315	,028	,691	1,447
	kemampuan auditor	,452	,140	,493	3,221	,003	,691	1,447

a. Dependent Variable: efektivitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10. Hal ini berarti model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* dari nilai residual. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Gleser* yang selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai signifikansi *t* dengan 0,05. Jika signifikansi $t_{hitung} < 0,05$, maka akan terjadi heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, jika signifikansi $t_{hitung} > 0,05$, maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji akan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,917	2,044		-,938	,357
	independensi	,020	,057	,077	,353	,727
	Kemampuan auditor	,091	,068	,293	1,346	,190

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas terdapat masing-masing variabel independen diperoleh *p-value* (sig-t) > 0,05. Variabel Independensi Auditor Investigatif memiliki nilai signifikansi t_{hitung} sebesar 0,727 dan variabel Kemampuan Auditor Investigatif memiliki nilai signifikansi t_{hitung} sebesar 0,190. Maka kesimpulan dari pengujian tersebut adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Pada tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Model regresi dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independensi auditor investigatif (X_1) dan kemampuan auditor investigatif (X_2) terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (Y). Berikut ini pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS.

Tabel 4.15 Model Persamaan Regresi

		Coefficients^a				
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,353	4,243		2,204	,036
	independensi	,276	,119	,354	2,315	,028
	Kemampuan auditor	,452	,140	,493	3,221	,003

a. Dependent Variable: efektivitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 9,353 + 0,276X_1 + 0,452X_2$$

Hasil pengujian yang diperoleh di atas adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta () yang diperoleh sebesar 9,353 artinya jika Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif bernilai 0 maka besarnya tingkat Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan yang terjadi adalah sebesar 9,353.
- Koefisien regresi $X_1 = 0,276$ artinya jika Independensi Auditor Investigatif naik sebanyak 1 satuan, maka Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan naik sebesar 0,276.
- Koefisien regresi $X_2 = 0,452$ artinya jika Kemampuan Auditor Investigatif naik sebanyak 1 satuan, maka Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan naik sebesar 0,452.

2. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Pengujian ini berguna untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16 Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,750 ^a	,563	,530	2,28806

a. Predictors: (Constant), kemampuan auditor, independensi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (*R Square*) sebesar 0,563 memberikan pengertian bahwa variabel Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif variasi yang terjadi pada variabel dependen (Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan) adalah sebesar 56,3% ditentukan oleh variabel Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif, selebihnya sebesar 43,7% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

3. Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji t

		Coefficients^a			
Model		Unstandardized		t	Sig.
		Coefficients			
		B	Std. Error		
1	(Constant)	9,353	4,243	2,204	,036
	independensi	,276	,119	2,315	,028
	Kemampuan auditor	,452	,140	3,221	,003

a. Dependent Variable: efektivitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh independensi auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan memiliki nilai $t_{hitung} 2,315 > t_{tabel} 1,703$, selain itu memiliki nilai signifikan $0,028 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.
- b. Pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan maka diperoleh nilai $t_{hitung} 3,221 > t_{tabel} 1,703$ dengan nilai signifikan $0,03 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

4. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi <

0,05 maka hipotesis diterima. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.18 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	182,016	2	91,008	17,384	,000 ^b
	Residual	141,351	27	5,235		
	Total	323,367	29			

a. Dependent Variable: efektivitas

b. Predictors: (Constant), kemampuan auditor, independensi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $17,384 > F_{tabel}$ sebesar 3,34 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa independensi dan kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan berpengaruh secara simultan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Independensi Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa diduga independensi auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2,315 > 1,703$ dengan signifikansi 0,028. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa Independensi Auditor Investigatif berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lameng (2017) bahwa independensi auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini membuktikan bahwa independensi auditor investigatif menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi independensi auditor investigatif maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan semakin baik.

2. Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua bahwa diduga kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3,221 > 1,703$ dengan signifikansi 0,03. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa Kemampuan Auditor Investigatif berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Patunru (2014) bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan auditor investigatif menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan auditor investigatif maka efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan semakin baik.

3. Variabel Kemampuan Auditor Investigatif yang Paling Berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga bahwa diduga kemampuan auditor investigatif yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} kemampuan auditor investigatif lebih besar dari pada independensi auditor investigatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh independensi dan kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (studi empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa independensi auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif lebih berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Setelah mengetahui bahwa Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif, maka sebaiknya dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi agar keefektifan pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan berjalan lebih baik dan optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya variabel yang digunakan lebih dikembangkan lagi dan memperluas objek penelitian agar dapat membandingkan tanggapannya dan dapat menambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianingsih, Arum. 2018. *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2015. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Budiasri, Nuruliani. 2017. *Analisis Pressure dan Opportunity dalam Perspektif Fraud Triangle terhadap Earnings Management*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fadli, Satria. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Due Professional Care Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurans (Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional)*. Jakarta: Grasindo.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Jesika, Maria Ludya, Ramot P. Simanjuntak, dan Salmon Sihombing. 2015. *Independensi dan Tanggung Jawab Auditor dan Pengaruhnya terhadap Opini Auditor*. Jurnal. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Jusup, Al Haryono. 2014. *Auditing (Pengauditan berbasis ISA)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Lameng, Agung Kresna Yogaswara Antonio. 2017. *Pengaruh Kemampuan, Pengalaman, dan Independensi Auditor pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif*. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Patunru, A.Arini Lestari. 2014. *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pratiwi, Andi St Haniah. 2017. *Pengaruh Independensi dan Pengalaman Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit melalui Skeptisisme Profesional Auditor*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pratiwi, Intan Feby. 2015. *Pengaruh Kemampuan dan Pengalaman Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Fraud*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rahmawati, Fitri. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rokhmawati, Nike Dessy. 2018. *Hubungan Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor dan Whistleblower dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 7th Edition. Chichester: John Wiley & Sons.

Sunyoto, Danang. 2014. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.

Tuanakotta, Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahono, Sugeng. 2011. (*Artikel Audit Investigasi*).

Wuysang, Recky Vincent Oktaviano, Grace Nangoi, dan Winston Pontoh. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Zimbelman, Mark F, dkk. 2014. *Akuntansi Forensik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

<https://manado.tribunnews.com/2012/05/21/bahar-dan-munzir-divonis-45-tahun-dan-4-tahun-penjara>

<https://tirto.id/kasus-suap-kemendes-pdtt-sugito-divonis-15-tahun-penjara-cy3n>

<https://www.antaraneews.com/berita/232501/auditor-bpk-jabar-divonis-empat-tahun>

<https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/29/05/2017/setelah-auditor-bpk-tersandung-korupsi/>





UNIVERSITAS



LAMPIRAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592 Faksimile (0411) 590595
Email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : S-1005/PW21/1/2019

8 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas BOSOWA
di Makassar

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : Putri Andira Nurdin

: 451 501 3038

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor
Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur
Audit dalam pembuktian Kecurangan (Studi Empiris pada
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan).

telah melakukan penelitian di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

An. Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Tata Usaha



Agus Catur Hartanto
NIP 197008081992021001

KUESIONER PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul **“Pengaruh Independensi dan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan”**, saya mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kuesioner ini digunakan sebagai bahan penelitian skripsi saya dan tidak untuk tujuan lain. Besar harapan saya kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan suatu jawaban yang sebenarnya atas pernyataan/pertanyaan yang diajukan.

1. Identitas Responden

Nama : _____

Usia : _____ tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3

Jabatan : _____

Lama Bekerja sebagai Auditor : _____ tahun

Pernah melakukan Audit Investigasi : Ya Tidak

2. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon Bapak/Ibu menjawab pernyataan/pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda () pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri

Bapak/Ibu. Setiap pernyataan/pertanyaan mengharapkan hanya ada satu jawaban dengan keterangan sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Daftar Kuesioner Penelitian Variabel X₁ : Independensi Auditor

No.	Pernyataan/Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Auditor bebas dari intervensi manajerial dalam menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit.				
2.	Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor bebas dari intervensi pihak lain untuk menyusun prosedur yang dipilih.				
3.	Auditor dapat langsung dan bebas mengakses semua catatan, karyawan, serta sumber informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban, dan sumber bisnis.				
4.	Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pemeriksaan.				
5.	Auditor bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan apa saja yang akan diperiksa.				
6.	Auditor bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat membatasi kegiatan pemeriksaan.				
7.	Auditor bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan.				
8.	Auditor bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang penting dalam laporan audit.				
9.	Auditor menghindari istilah atau kata-kata yang menyesatkan dalam pelaporan fakta, opini, dan rekomendasi.				

10.	Auditor bebas dari usaha tertentu untuk mengesampingkan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam pelaporan.				
-----	---	--	--	--	--

Daftar Kuesioner Penelitian Variabel X₂ : Kemampuan Auditor

No.	Pernyataan/Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Dalam melakukan audit investigatif auditor menerapkan ilmu <i>Auditing</i> .				
2.	Memperhatikan teknik-teknik audit investigasi dalam memperoleh bukti.				
3.	Auditor merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang telah diperoleh.				
4.	Auditor memahami masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi.				
5.	Auditor mengetahui tentang hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.				
6.	Setelah melakukan audit investigasi, auditor memperoleh hipotesis pada suatu tahap penyidikan.				
7.	Auditor mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis.				
8.	Auditor melaksanakan investigasi sesuai standar yang berlaku umum.				
9.	Pada saat investigasi auditor memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat bersikap tidak memihak dalam memberikan pendapat.				
10.	Auditor melakukan evaluasi secara kritis bukti-bukti audit.				

Daftar Kuesioner Penelitian Variabel Y : Efektivitas Pelaksanaan Prosedur

Audit dalam Pembuktian Kecurangan

No.	Pernyataan/Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Auditor melaksanakan telaahan atas pengendalian <i>intern</i> .				
2.	Program audit yang telah disusun mempermudah pembagian tugas bagi tim auditor investigasi.				

3.	Dalam pelaksanaan audit investigasi, auditor dituntut untuk mengembangkan teknik-tekniknya secara tepat.				
4.	Laporan hasil audit investigasi disusun dengan tepat waktu.				
5.	Auditor memeriksa fisik dengan menghitung berbagai komponen dalam laporan keuangan.				
6.	Auditor memeriksa dokumen termasuk informasi yang diolah kemudian di simpan secara elektronik (digital).				
7.	Mempunyai gagasan untuk melakukan <i>review analytical</i> .				
8.	Auditor meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada <i>auditee</i> .				
9.	Auditor melaksanakan perhitungan kembali.				
10.	Auditor mengamati atau mengobservasi untuk membuktikan adanya kecurangan.				

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah saya berikan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di Universitas Bosowa Fakultas Jurusan Akuntansi.

Data Uji Coba Penelitian Variabel

1. Independensi Auditor Investigatif

Responden	Butir Pertanyaan Independensi Auditor Investigatif										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	33
2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	4	17
3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	26
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
5	2	2	3	3	4	4	3	2	3	3	29
6	3	1	2	3	3	4	4	3	2	2	27
7	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
8	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
9	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	33
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
12	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	36
13	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	34
14	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	32
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	3	4	3	4	4	3	1	4	4	3	33
17	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	37
18	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	30
21	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	35
22	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	22
23	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
25	1	2	4	4	4	4	3	3	3	4	32
26	3	2	3	3	3	4	3	1	3	2	27
27	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	33
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
29	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	30
30	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
31	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	33

2. Kemampuan Auditor Investigatif

Responden	Butir Pertanyaan Kemampuan Auditor Investigatif										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	36
2	3	3	4	2	3	2	2	2	1	1	23
3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	24
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	3	3	4	2	3	2	4	2	31
6	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
9	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	34
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	35
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	37
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	4	3	2	3	2	3	3	4	3	3	30
17	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	34
18	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
21	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	37
22	3	3	2	2	2	2	2	4	3	2	25
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
27	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	33
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
29	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	36
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
31	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	35

3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Responden	Butir Pertanyaan Efektivitas Pelaksanaan Prosedur										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	35
2	4	3	3	3	3	3	3	1	2	3	28
3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	22
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	1	3	4	2	3	2	4	3	2	4	28
6	3	4	4	3	3	4	2	2	3	3	31
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
8	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
9	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	35
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	33
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	35
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	34
17	4	4	2	2	4	3	4	3	4	4	34
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	23
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	36
27	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	32
28	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	33
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
31	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	34

Data Hasil Penelitian Variabel

1. Independensi Auditor Investigatif

Responden	Butir Pertanyaan Independensi Auditor Investigatif										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
7	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	35
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
10	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	3	2	3	4	4	4	3	4	4	35
14	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	28
15	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	31
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	3	3	2	3	2	4	4	3	3	2	29
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
23	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
24	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
25	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	37
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
27	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	30
28	4	3	2	3	4	4	4	3	4	4	35
29	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	31
30	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	37

2. Kemampuan Auditor Investigatif

Responden	Butir Pertanyaan Kemampuan Auditor Investigatif										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	34
11	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	36
12	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
13	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	37
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
19	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
20	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31
21	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	34
22	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
27	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	32
28	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	37
29	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	33
30	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	35

3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Responden	Butir Pertanyaan Efektivitas Pelaksanaan Prosedur										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
5	4	4	3	2	3	3	3	4	4	4	34
6	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
7	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	32
8	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	35
9	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	32
10	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
11	4	4	3	2	3	3	3	4	4	4	34
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	35
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	32
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	34
21	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	35
22	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	35
23	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	35
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	3	2	3	3	3	4	4	4	34
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
27	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	34
28	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
29	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	35
30	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
independensi	30	2,80	4,00	3,4833	,42918
kemampuan auditor	30	3,00	4,00	3,3800	,36427
efektivitas	30	3,00	4,00	3,4233	,33392
Valid N (listwise)	30				



I9	Pearson	,317	,524**	,599**	,537**	,605**	,407*	,420*	,286	1	,177	,702**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	,083	,002	,000	,002	,000	,023	,019	,119		,340	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
I10	Pearson	,291	,345	,331	,130	,087	,280	,126	,317	,177	1	,442*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	,113	,057	,069	,486	,641	,128	,499	,083	,340		,013
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X1	Pearson	,597**	,731**	,812**	,717**	,701**	,703**	,724**	,712**	,702**	,442*	1
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,013	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UNIVERSITAS
BOSOWA



2. Kemampuan Auditor Investigatif

Correlations

		KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	KA7	KA8	KA9	KA10	X2
KA1	Pearson Correlation	1	,586**	,215	,621**	,608**	,487**	,621**	,576**	,469**	,498**	,735**
	Sig. (2-tailed)		,001	,246	,000	,000	,005	,000	,001	,008	,004	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA2	Pearson Correlation	,586**	1	,570**	,570**	,756**	,503**	,570**	,417*	,502**	,619**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,001		,001	,001	,000	,004	,001	,020	,004	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA3	Pearson Correlation	,215	,570**	1	,476**	,549**	,393*	,401*	,133	,104	,455*	,549**
	Sig. (2-tailed)	,246	,001		,007	,001	,029	,025	,475	,579	,010	,001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA4	Pearson Correlation	,621**	,570**	,476**	1	,697**	,546**	,700**	,576**	,461**	,716**	,832**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,007		,000	,001	,000	,001	,009	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA5	Pearson Correlation	,608**	,756**	,549**	,697**	1	,569**	,697**	,454*	,410*	,573**	,815**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,001	,000	,010	,022	,001	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA6	Pearson Correlation	,487**	,503**	,393*	,546**	,569**	1	,852**	,667**	,393*	,789**	,812**
	Sig. (2-tailed)	,005	,004	,029	,001	,001		,000	,000	,029	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA7	Pearson Correlation	,621**	,570**	,401*	,700**	,697**	,852**	1	,650**	,580**	,716**	,890**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,025	,000	,000	,000		,000	,001	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA8	Pearson Correlation	,576**	,417*	,133	,576**	,454*	,667**	,650**	1	,430*	,663**	,732**
	Sig. (2-tailed)	,001	,020	,475	,001	,010	,000	,000		,016	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA9	Pearson Correlation	,469**	,502**	,104	,461**	,410*	,393*	,580**	,430*	1	,488**	,651**
	Sig. (2-tailed)	,008	,004	,579	,009	,022	,029	,001	,016		,005	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
KA10	Pearson Correlation	,498**	,619**	,455*	,716**	,573**	,789**	,716**	,663**	,488**	1	,857**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,010	,000	,001	,000	,000	,000	,005		,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2	Pearson Correlation	,735**	,782**	,549**	,832**	,815**	,812**	,890**	,732**	,651**	,857**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Correlations

		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	Y
E1	Pearson Correlation	1	,784**	,311	,715**	,614**	,680**	,477**	,395*	,585**	,473**	,784**
	Sig. (2-tailed)		,000	,088	,000	,000	,000	,007	,028	,001	,007	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E2	Pearson Correlation	,784**	1	,493**	,611**	,668**	,734**	,533**	,550**	,611**	,589**	,849**
	Sig. (2-tailed)	,000		,005	,000	,000	,000	,002	,001	,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E3	Pearson Correlation	,311	,493**	1	,534**	,266	,502**	,452*	,488**	,314	,576**	,644**
	Sig. (2-tailed)	,088	,005		,002	,148	,004	,011	,005	,085	,001	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E4	Pearson Correlation	,715**	,611**	,534**	1	,539**	,667**	,499**	,489**	,483**	,486**	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002		,002	,000	,004	,005	,006	,006	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E5	Pearson Correlation	,614**	,668**	,266	,539**	1	,601**	,500**	,688**	,737**	,537**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,148	,002		,000	,004	,000	,000	,002	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E6	Pearson Correlation	,680**	,734**	,502**	,667**	,601**	1	,304	,640**	,667**	,458**	,815**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000	,000		,096	,000	,000	,009	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E7	Pearson Correlation	,477**	,533**	,452*	,499**	,500**	,304	1	,595**	,499**	,710**	,717**
	Sig. (2-tailed)	,007	,002	,011	,004	,004	,096		,000	,004	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E8	Pearson Correlation	,395*	,550**	,488**	,489**	,688**	,640**	,595**	1	,678**	,608**	,797**
	Sig. (2-tailed)	,028	,001	,005	,005	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E9	Pearson Correlation	,585**	,611**	,314	,483**	,737**	,667**	,499**	,678**	1	,486**	,784**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,085	,006	,000	,000	,004	,000		,006	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
E10	Pearson Correlation	,473**	,589**	,576**	,486**	,537**	,458**	,710**	,608**	,486**	1	,762**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,001	,006	,002	,009	,000	,000	,006		,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y	Pearson Correlation	,784**	,849**	,644**	,784**	,786**	,815**	,717**	,797**	,784**	,762**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

1. Independensi Auditor Investigatif

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,874	10

2. Kemampuan Auditor Investigatif

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,917	10

3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,922	10

BOSOWA



Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,20775187
Most Extreme Differences	Absolute	,158
	Positive	,158
	Negative	-,110
Test Statistic		,158
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

BOSOWA



Hasil Uji Multikolinearitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,750 ^a	,563	,530	2,28806

a. Predictors: (Constant), kemampuan auditor, independensi

b. Dependent Variable: efektivitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	182,016	2	91,008	17,384	,000 ^b
	Residual	141,351	27	5,235		
	Total	323,367	29			

a. Dependent Variable: efektivitas

b. Predictors: (Constant), kemampuan auditor, independensi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,353	4,243		2,204	,036		
	independensi	,276	,119	,354	2,315	,028	,691	1,447
	kemampuan auditor	,452	,140	,493	3,221	,003	,691	1,447

a. Dependent Variable: efektivitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,342 ^a	,117	,051	1,10230

a. Predictors: (Constant), kemampuanauditor, independensi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,333	2	2,166	1,783	,187 ^b
	Residual	32,806	27	1,215		
	Total	37,139	29			

a. Dependent Variable: RES2

b. Predictors: (Constant), kemampuanauditor, independensi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,917	2,044		-,938	,357
	independensi	,020	,057	,077	,353	,727
	kemampuanauditor	,091	,068	,293	1,346	,190

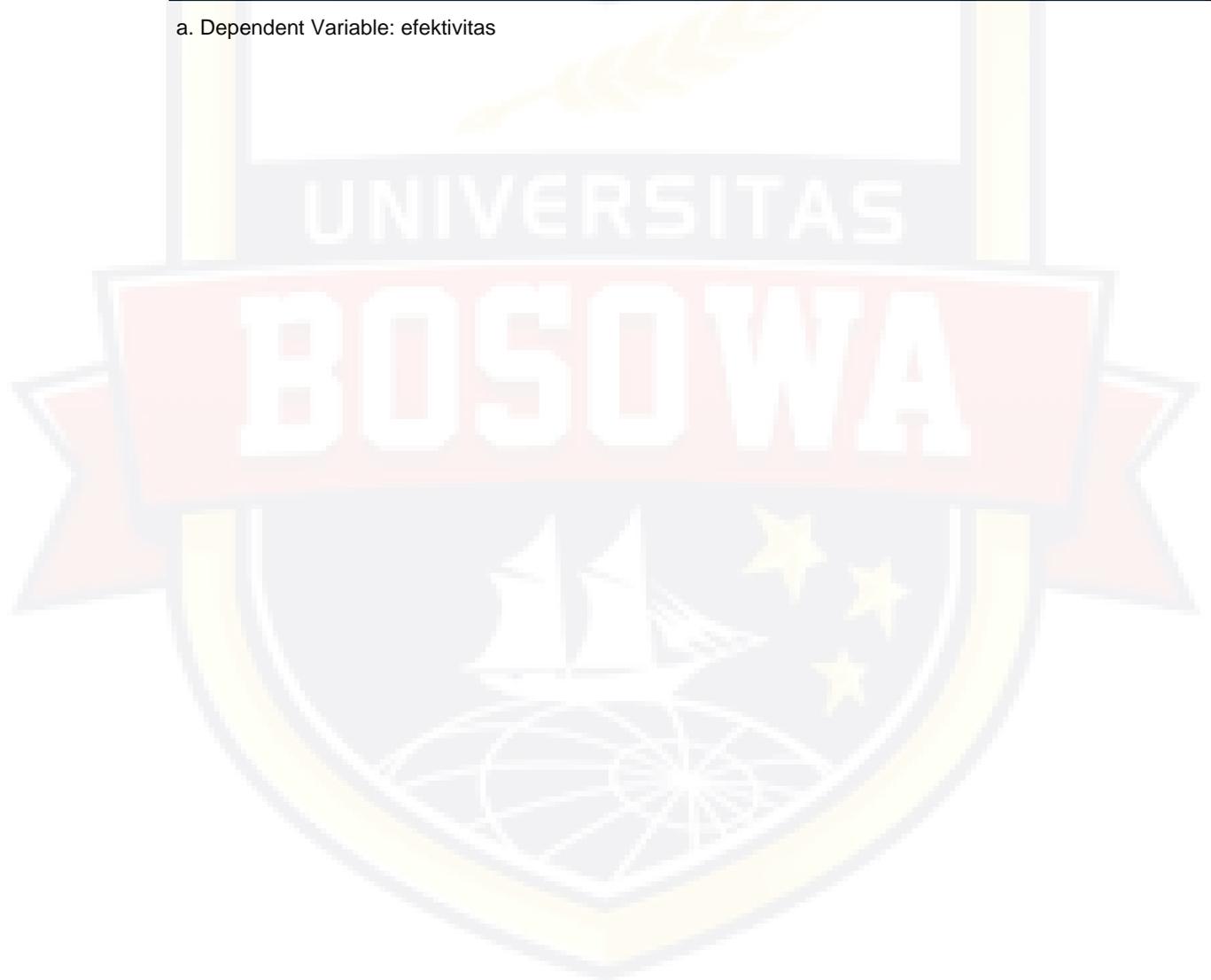
a. Dependent Variable: RES2

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	9,353	4,243		2,204	,036
	independensi	,276	,119	,354	2,315	,028
	kemampuan auditor	,452	,140	,493	3,221	,003

a. Dependent Variable: efektivitas



Tabel r untuk df = 1 - 35

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4249	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3872	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.4322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 30)

Pr Df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65874	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96458	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73408	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.09596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518

Tabel Statistik F (P = 0.05)

df2/df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.53	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08